

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amalia, Nailu Vina. “Jual Beli Tanah Dalam Hukum Tanah Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bertingkat Yang Dibuat Oleh Notaris.” *Notaire 4*, no. 2 (2021): 217.
- Amirudin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arum Priyani. “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah yang Masih Menjadi Hak Milik Bersama Namun Dijadikan Jaminan Hutang Di Bank (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)” (2017): 9.
- bappeda litbang. “Pertumbuhan Ruko (Rumah Toko Di Kota).” *probolingo.go.id*. terakhir dimofikasi 2016. diakses Maret 31, 2016. bappedalitbang.probolinggokota.go.id,.
- Budiman N.P.D.Sinaga. *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Busyro, Marwan, and Ridwan Rangkuti. “Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): 23.
- Cici Fajar Novita. “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo).”, (2014): 44.
- Dita Rizky Damayanti. “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Hak Milik atas Tanah dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang).” (2014): 1222–1239.
- Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Van Dunne dan Van der Burght, Dalam H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*,. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Penerjemah, M.*

Khozim. Edited by Nurainun Mangunsong. VI. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

H. Salim HS. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*.. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hadi, Abdul. “Jual Beli Tanah Hak Milik Tanpa Melalui Ppat” (1987): 55.

Ibnu Ismail. “Agunan Adalah: Pengertian, Jenis Agunan yang Bisa Dilakukan.” *Accurate.Id*. terahir dimodifikasi 2021. diakses Febuari 19, 2021. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/agunan-adalah/>.

Undang-Undang, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman., 2011.

———. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman., 2011.

———. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris.

———. Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokk Agraria.,.

———. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.,

Irene Eka Sihombing. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2017.

Jevelyn Lidyawati. “Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Sengketa.” *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2017): 130.

M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung,: Alumni, 1986.

Margaretha Putri Christy Kalengkongan dkk. “Kajian Yuridis Penyelsaian Kasus Sengketa Jal Beli Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi).” *Lex Crimen* IX, no. 8 (2018): 1–15.

Mariam Darus Badruzaman. *Komilasi Hukum Peikatan*. Jakarta: Aditya Bakti, 2001.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontak & Perancangan Kontrak*. Edited by Fajar interpratama mandiri offset. Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Pemerintah. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

———. Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri, Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum Dan Satuan Rumah Susun Umum, 2021.

———. Pasal 1 Angka 2 Peraturam Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum Dan Satuan Rumah Susun.,

———. Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Dan Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum.

———. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

———. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah,

Pingkan Martina Manueke. *“Jual Beli Tanah yang Mempunyai Sertifikat Hak atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”* *lex Privatum* 2, no. 2 (2018): 2016.

Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z. *Teori Konflik Sosial / Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin ; Penerima, Helly P. Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sinaga, Sahat HMT. *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak.* Bandung: Pustaka Sutra, 2007.

Soekanto, Soerjono Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali pers, 2015.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata.* Yogyakarta: yayasan badan “gajah mada,” 1981.

Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 2002.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Bab Kedua Buku Ketiga, KUHPerdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Teguh Susanto. “Selayang Pandang.” *Pemerintah Kota Tanjungpinang.* terakhir dimodifikasi 2017. diakses Juli 25, 2017. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/>.

Keputusan Menteri. Lampiran I, Angka 4, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah., n.d.

———.Lampiran I, Angka I Romawi, Angka 1, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

———.Lampiran I, Angka II Romawi, Angka 2, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

“Lima Tahapan Jual Beli Tanah Yang Wajib Anda Ketahui.” *smartlegal.id*. terakhir dimodifikasi 2018. diakses Desember 5, 2018. <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/05/tahapan-jual-beli-tanah/>.

“Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif.” *Idtesis*. terakhir dimodifikasi 2013. diakses Januari 21, 2013. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

“Rencana Progran Investasi Jangka Menengah Kota Tanjungpinang.” *Cipta Karya*. terakhir dimodifikasi 2018. <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>.

